

PEMBUKAAN TRANS JATENG KORIDOR 7
Tunggu Kebijakan Gubernur 2024



KR-Abdul Alim

Tasyakuran HUT ke-68 Perhubungan di Karanganyar.

KARANGANYAR (KR) - Pemkab Karanganyar menunggu kebijakan Pemprov Jawa Tengah terkait pembukaan rute Solo-Karangpandan bus Trans Jateng Koridor 7 Subosukowonosraten. Kepala Dinas Perhubungan Karanganyar, Sri Suboko mengatakan pembukaan Koridor 7 Trans Jateng Subosukowonosraten pada tahun ini hanya sampai rute Wonogiri.

Menurutnya, koridor 7 armada transportasi massal milik Pemprov Jateng itu telah diprogramkan dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Namun pembukaan rute Solo-Karangpandan belum dimasukkan. RPJMD Pemprov Jateng 2018-2023 untuk Trans Jateng tidak memasukkan pembukaan rute Solo-Karangpandan melewati Karanganyar.

"Karena program itu punya Pemprov, kita hanya bisa mengikuti, menunggu Gubernur Jateng 2024. Diharapkan, rute Trans Jateng di Karanganyar dibahas lagi secara serius," tandas Sri Suboko usai acara Hari Perhubungan ke-68 di kantornya, Senin (18/9).

Disebutkan, bus Trans Jateng beroperasi di 7 koridor di wilayah Jawa Tengah. Pembukaan rute di Wonogiri pada 8 Agustus 2023 menambah layanan di wilayah Subosukowonosraten.

Studi kelayakan pembukaan rute Karanganyar sudah dilakukan, termasuk jalur yang dilalui dan halte. Bahkan Pemkab Karanganyar sudah mengajukan hasil studi kelayakan itu agar dipertimbangkan untuk operasional angkutan umum perintis.

"Pada 2020 lalu diawali pembahasan dengan Damri. Tapi terhenti karena pandemi. Sampai sekarang belum dibahas lagi. Tapi kami sudah melakukan studi kelayakan jika nantinya koridor 7 Subosukowonosraten jadi ambil ke Karanganyar," tandas Sri Suboko.

Menurutnya, opsi pemakaian transportasi publik paling tepat untuk mencegah polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Bupati Karanganyar Juliyatmono juga menyepakati penancangan program *green transportation*.

(Lim)-f

17 DESA SUDAH MENGALAMI KEKERINGAN

Sukoharjo Jamin Bantuan Air Bersih

SUKOHARJO (KR) - Sebanyak 85 kepala keluarga (KK) atau 320 jiwa warga Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari kekurangan air bersih akibat sumur kering terdampak musim kemarau. Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengirim langsung bantuan air bersih di Kedungjambal.

Air bersih diangkut menggunakan truk tangki milik PMI dan PDAM Sukoharjo. Bantuan air bersih juga disalurkan di tempat fasilitas umum masyarakat, seperti sekolah dan masjid.

"Pemkab Sukoharjo akan terus mengirimkan bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan, sebab sekarang merupakan puncak kemarau bersamaan dengan fenomena alam El Nino," jelas Etik Suryani usai penyaluran bantuan air bersih di Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari, Senin (18/9).

Bupati minta warga yang mengalami kekurangan air bersih agar melapor kepada kepala desa dan diteruskan ke camat.

Selanjutnya dilaporkan ke bupati dan akan dilakukan pengiriman bantuan air bersih. Bupati juga minta warga terdampak kekeringan ti-

dak perlu khawatir kekurangan air bersih karena kebutuhan sepenuhnya dijamin Pemkab Sukoharjo.

Menurut Etik Suryani, Pemkab Sukoharjo juga sudah menyiapkan program sumur dalam di Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo Ariyanto Mulyatmojo menambahkan, ada 85 KK atau 320 jiwa warga di Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari kekurangan air bersih terdampak musim kemarau. Kondisi sumur warga mengering karena kemarau panjang.

"Bantuan air bersih untuk warga sudah dijamin Pemkab. Apabila ada kekurangan, warga tinggal melapor kepada petugas dan segera dikirim," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo Ariyanto Mulyatmojo mengatakan, 12 desa dari total 17 desa rawan kekeringan di Kecamatan Tawang Sari, Weru dan Bulu pada musim kemarau ini sudah mengalami kekurangan air bersih.

Lima desa lainnya juga terancam kekurangan air bersih apabila hujan tidak segera datang. Empat desa dari total 17 desa tersebut sudah mengalami kekeringan pada akhir Juli lalu.

Cuaca panas saat ini semakin berdampak pada wilayah rawan kekeringan tersebut. Sampai awal

September 2023, dari total 17 desa rawan kekeringan, 12 desa di antaranya sudah kekeringan. BPBD Sukoharjo mencatat ada 12 desa di tiga kecamatan terdampak kekeringan terdiri 32 dukuh. Tercatat ada 2.194 KK atau 8.002 jiwa kekurangan air bersih," jelas Ariyanto.

(Mam)-f



KR-Wahyu Imam Ibadi

Bupati Sukoharjo saat penyaluran bantuan air bersih di Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari.

APBD REMBANG 2023 DEFISIT

Banyak Proyek Mangkrak

REMBANG (KR) - Berbagai rapat dan sidang di lingkungan DPRD Rembang sering molor, salah satu pemicunya adalah defisitnya APBD tahun anggaran 2023 di Kabupaten Rembang hingga mencapai Rp 143 miliar. Akibatnya banyak kegiatan atau proyek yang mangkrak hingga September ini. Di antaranya, rapat paripurna pembahasan penetapan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) batal dilaksanakan, sehingga membuat kecewa kalangan legislatif.

"Rekan-rekan di DPR Rembang

terpaksa harus merombak sejumlah agenda, terutama untuk September hingga Desember mendatang," ungkap H Subawoto (PKB), baru-baru ini. Hal senada diungkapkan Puji Santoso (Gerindra), baru-baru ini.

Berbagai data yang berhasil dihimpun KR selama beberapa pekan ini menyebutkan, defisit APBD Kabupaten Rembang tahun 2023 menyebabkan berbagai kegiatan mengalami hambatan. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikabarkan sudah menerjunkan tim dan melakukan pemeriksaan. Namun belum ba-

nyak hasil yang diketahui atas hasil pemeriksaan BPK terhadap difisitnya APBD Rembang tahun 2023.

Bupati Rembang H Abdul Hafid dalam berbagai kesempatan menyatakan, untuk menyikapi defisitnya APBD, semua pihak diminta realistis. Pemkab juga sudah melakukan refocussing (pengetatan) anggaran di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah).

"Soal anggaran defisit, sudah biasa. Dulu kita juga pernah surplus anggaran. Kok sekarang jadi geger? ungkap bupati kepada

awak media di kompleks Pendapa Kabupaten Rembang, beberapa hari lalu.

Anggota Badan Anggaran DPRD Rembang, Puji Santoso kepada wartawan di kompleks DPRD setempat menambahkan, legislatif belum bisa melaksanakan berbagai agenda dikarenakan penyerahan dokumen KUA PPAS molor. Padahal, lanjut politisi Gerindra asal Lasem itu, sudah ada kesepakatan antara Badan Musyawarah (Banmus) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

(Ags)-f

HUKUM

JAKSA AKAN AJUKAN KASASI

3 Terdakwa Kasus Korupsi PNPM Divonis Bebas

PURWOKERTO (KR) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto Jawa Tengah, akan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi yang memvonis bebas tiga terdakwa korupsi dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah.

Kajari Purwokerto, Imanuel Rudy Pailang, saat dikonfirmasi Selasa (18/9), menjelaskan ia menghormati putusan majelis hakim yang membebaskan ketiga terdakwa. "Itu hak hakim untuk memutuskan, silakan. Kami pasti akan melakukan kasasi," ungkapnya.

Berkaitan putusan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah itu, pihaknya akan segera menindaklanjuti secepatnya putusan tersebut dengan membebaskan para terdakwa dari Rutan Banyumas.

"Saya baru menerima surat pemberi-

tahanan putusan tersebut dari PN Tipikor Semarang, pada hari ini. Sesegera mungkin kami laksanakan itu, mudah-mudahan hari ini bisa selesai, kan ada birokrasinya. Saya sudah perintahkan Kasi Pidsus untuk segera diproses," ujar Rudy.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memvonis bebas tiga terdakwa korupsi dana eks PNPM Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Ketiganya yaitu Purjito yang saat itu menjabat sebagai Camat Kedungbanteng, Arif Indra Setyadi Komisaris Utama PT LKM Kedungmas dan Ida Rokhani Direktur Utama PT LKM Kedungmas.

Saat di pengadilan tingkat pertama, ketiga terdakwa divonis bervariasi Purjito dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Sedangkan dua terdakwa lainnya divonis lima tahun penjara.

(Dri)-f

DIDUGA KORUPSI RATUSAN JUTA

Oknum Kades Songgom Ditahan Kejaksaaan

BREBES (KR) - Diduga korupsi APBDes mencapai ratusan juta rupiah, Kades Songgom, Kecamatan/Kabupaten Brebes, Sa (54), terpaksa meringkuk di tahanan sementara titipan Kejaksaan setempat. Sementara warga Songgom mendesak pemerintah untuk menunjuk PLT kades.

Kasi Intel Kejari Brebes, Dwi Rahjanto, Selasa (19/9), membenarkan sudah menetapkan Sa Kades Songgom nonaktif, sebagai tersangka. "Dalam data yang kami dapatkan, kades itu diduga menggunakan dana desa sampai Rp 386 juta dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 lalu. Motifnya, tersangka memanfaatkan uang yang sudah di-cairkan bendahara dari bank untuk kepentingan pribadi," ungkapnya.

Dikatakan, oknum kades itu bahkan tidak bisa menunjukkan pelaporan pertanggungjawaban dari penggunaan uang negara itu. "Kerugian negara yang ditimbulkan, meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan SILPA

APBDes 2021. Sambil menunggu sidang, tersangka Sa kami tahan dan ditempatkan pada Lapas Kelas II B Brebes. Terhitung, sejak 11 hingga 30 September mendatang, selama 20 hari," tegas Dwi.

Sementara warga Songgom mendesak Kecamatan setempat, agar segera menunjuk YMT, supaya pelayanan tidak terhambat. "Kami mendesak ada pejabat kades sementara, agar pelayanan administrasi kepada warga tidak terganggu," ujar Sumarto, tokoh warga.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Brebes, Hengky Oxtovianto P, mengatakan status Sa sudah tersangka, yang di-

nonaktifkan sementara. Proses pengantiannya harus menempuh mekanisme cukup panjang.

Dijelaskan, pemberhentian sementara Kades Songgom, mengacu Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Nomor Print 403/M.3.30/Fd.1/09/2023, tertanggal 11 September 2023, dengan jenis penahanan Rutan.

"Karena yang bersangkutan berurusan dengan hukum. Sehingga, kewenangan menunjuk pejabat sementara pengganti Kades menjadi kebijakan Camat Songgom," ujar-nya.

Hengky menuturkan, setelah penunjukan YMT untuk mengisi kekosongan jabatan kades. Mekanisme penunjukan Pejabat Sementara (Pjs) Kades, tetap diajukan camat ke bupati melalui Dinpermasdes. "Kemudian, tugas Pjs mulai berlaku setelah ada keputusan bupati sampai vonis putusan hakim", tutur Hengky.

(Ryd)-f

Maling Kotak Infaq Dibekuk

YOGYA (KR) - Nekat mencuri kotak infaq, penggangguan berinisial AL (28) warga Umbulharjo, kini mendekam di sel tahanan Polsek Umbulharjo. AL melakukan aksinya di Masjid Mujahidin Muja Muju Umbulharjo dengan alasan masalah ekonomi.

"Polisi mengamankan barang bukti flask disk

rekaman CCTV, jaket, tатаh dan kotak Infaq," tutur Kapolsek Umbulharjo, Kompol Yayan Dewayanto SH, Senin (18/9).

Didampingi Kanit Reskrim Iptu Haryadi SH MM dan Kabag Humas Polresta Yogya AKP Timbul SR SH, Kompol Yayan menjelaskan kronologi

awal pelaku datang ke lokasi berjalan kaki, Kamis (7/9), sekitar pukul 05.15.

Setelah memastikan situasi aman, pelaku lantas masuk dalam masjid dan membawa kotak infaq, menyembunyikan di sebuah gorong-gorong tidak jauh dari rumahnya.

"Pelaku mengongkel kotak infaq dari kayu dengan menggunakan tатаh, serta mengambil uang Rp 70.000 yang ada di kotak infaq. Sialnya pelaku saat membuka kotak infaq diketahui salah seorang warga yang melapor dan dikuatkan CCTV di Masjid," ungkapnya.

Iptu Haryadi menambahkan, kasus ini masih dikembangkan, karena pelaku ini juga seorang residivis kasus psikotropika.

"Pelaku kita jerat Pasal 363 KUHP ancaman hukuman 7 tahun penjara," jelasnya.

(Vin)-f



KR-Juvintarto

Pelaku pencurian kotak infaq dan barang bukti ditunjukkan di Mapolsek Umbulharjo.

pulang sepeda motor sudah tidak ada ditempat semula.

Selanjutnya Selasa (12/9), petugas piket jaga Sabhara didatangi takmir Masjid Al-Huda memberitahukan bahwa pencuri yang beraksi di Gandekan ditangkap di Gandekan dan dihajar massa. Kemudian tersangka diserahkan ke Polres Bantul.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, petugas melakukan pelacakan barang bukti, menemukan satu barang bukti sepeda motor yang

sudah dijual di Gunungkidul sedangkan sepeda motor yang satu dijual di wilayah Klaten hingga sekarang masih dalam pelacakan.

Karena ulahnya tersebut, pelaku bisa dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan bisa diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dengan kedua kejadian tersebut, Kasat Reskrim mengingatkan kepada warga hendaknya berhati-hati jangan lupa mencabut kunci saat meninggalkan sepeda motornya.

(Jdm)-f



KR-Judiman

Tersangka TR diamankan di Mapolres Bantul.